

MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: TINJAUAN TERHADAP TAFSIR BEBERAPA AYAT TERKAIT MODERASI BERAGAMA

Zamakhsyari bin Hasballah Thaib
Universitas Dharmawangsa

Keywords:

Ayat mengenai moderasi beragama, wasatiyyah dalam al-Qur'an, moderasi beragama di Indonesia, tantangan moderasi beragama, Prinsip Moderasi beragama MUI.

***Correspondence Address:**

dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi moderasi beragama yang diterapkan di Indonesia dari perspektif al-Qur'an, melalui analisis terhadap ayat – ayat al-Qur'an yang membahas mengenai moderasi beragama. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i). Diantara Kesimpulan penting dalam penelitian ini: (1) Al-Qur'an telah meletakkan dasar penting dalam moderasi beragama, yang terlihat dari banyaknya ayat yang membahas tema ini. Karakteristik ajaran Islam yang wasatiyyah juga semakin menguatkan bahwa moderasi beragama merupakan bagian integral dari ajaran Islam. (2) Moderasi beragama telah terimplementasikan sepanjang Sejarah peradaban Islam. Walaupun dalam implementasinya terjadi pasang surut, namun sikap moderat Adalah sikap mayoritas umat Islam sepanjang sejarah (3) Ada banyak tantangan dan rintangan dalam implementasi moderasi beragama di Indonesia, mulai dari pendefinisian moderasi beragama, pengarus utamaan sikap moderat, serta menempatkan konsep moderasi beragama dalam konteks tradisi agama yang besar. Terlepas dari beragam tantangan di atas, MUI telah menetapkan prinsip dalam moderasi beragama, sebagaimana prinsip ini juga dikuatkan oleh Kemenag dengan menetapkan pilar moderasi beragama.

PENDAHULUAN

Keragaman dalam beragama merupakan elemen yang signifikan dari rencana Tuhan yang tidak boleh diabaikan. Tentu saja, perbedaan ini dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan. Islam selalu menginterpretasikan kondisi untuk memenuhi kebutuhan dan semangat zaman modern agar mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial. Mengingat tantangan yang dihadapi sangat berbeda dengan situasi dan era Nabi Muhammad (SAW) serta setelahnya, diperlukan pendekatan yang lebih moderat dalam hal ini. Selain itu, sikap toleran dan

terbuka sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Penjelasan dalam Al-Qur'an memberikan landasan untuk memahami prinsip moderasi yang diajarkan oleh Islam. Secara umum, Al-Qur'an menggunakan kata *wasatiyyah* untuk menyampaikan makna moderasi dalam Islam, yang merujuk pada frasa *ummatan wasatan* dalam surat al-Baqarah ayat 143, yang artinya: "Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Nabi (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

Dalam bahasa Arab, istilah *wasatiyyah* berasal dari kata kerja *wasata*. Pengertian dasar dari *wasatiyyah* dalam berbagai kamus bahasa Arab dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, *wasatiyyah* memiliki dua makna utama, yaitu: pertama, sebagai kata benda (*ism*), yang berarti sebagai mediator atau penghubung (*al-bainiyyah*) antara dua hal atau dua keadaan atau antara dua sisi yang bertentangan. Kedua, lebih bersifat teoritis (*theoretical*) yang merujuk pada yang terbaik, adil, pilihan, dan utama.

Jika diperhatikan, terdapat dua elemen yang menjadi masalah dalam moderasi umat Islam dari masa lalu hingga sekarang, yang masing-masing berasal dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang, terutama dalam pendidikan dan pemahaman tentang agama, bahkan ada ketidakpahaman mengenai ilmu agama itu sendiri. Umat Islam terpecah menjadi berbagai kelompok dengan pemahaman yang berlainan. Beberapa di antara mereka cenderung memiliki pandangan ekstrem tentang agama dan sulit untuk menginterpretasikan hukum-hukum yang ada, kadang-kadang memaksa masyarakat Muslim untuk melaksanakan ajarannya bahkan melakukan tindakan yang anarkis demi mencapai tujuannya. Sikap kaku dalam beragama menyebabkan kurangnya keterbukaan dan penerimaan terhadap kelompok lain, sehingga mereka mudah menilai dan menghakimi orang yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Di sisi lain, ada kecenderungan fanatik dalam beragama dan *ghulūw* terhadap tokoh agama, sehingga mereka yang kurang berpengetahuan agama pun diangkat menjadi ulama, yang mempersempit pemahaman mereka hanya sebatas pada perkataan guru, dan menginterpretasikan agama dengan cara yang longgar atau dengan bersikap mudah dalam hal-hal baru (*bid'ah*), serta menerima pemikiran negatif dan cerita-cerita khurafat tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mempraktikkannya dalam kehidupan beragama.

Pemahaman yang salah dan kurang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip Islam

dapat mengarah pada tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama tersebut, seperti munculnya tuduhan yang tidak berdasar terhadap kelompok tertentu serta tindakan yang mengancam persatuan umat. Contohnya adalah peristiwa pembubaran diskusi-diskusi Islam dan penolakan terhadap para pendakwah di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Aceh, hingga terjadi penghentian pembangunan masjid, penutupan, bahkan hingga perusakan dan pembakaran masjid.¹

Faktor-faktor dari luar juga menjadi hambatan bagi umat Islam saat ini, yang muncul dari kritik-kritik terhadap mereka oleh kelompok-kelompok yang memang tidak menyukai Islam sejak awal, terutama dari dunia Barat yang melihat Islam sebagai ancaman bagi peradaban mereka. Mereka menggambarkan Islam sebagai agama yang menakutkan, penuh kekerasan, hingga menilai Islam sebagai penganut terorisme dan diskriminasi terhadap perempuan, serta sebagai agama yang kaku dan menolak kemajuan, sehingga muncullah istilah Islamofobia. Apa yang dialami umat Islam di berbagai belahan dunia, baik dalam hal sikap maupun tindakan, seringkali dianggap sebagai kebenaran yang dibenarkan oleh alasan pembelaan terhadap Islam yang dianggap sebagai ancaman, seperti yang terlihat di kawasan timur tengah saat ini. Kekacauan dan krisis kemanusiaan di timur tengah sebagian besar disebabkan oleh intervensi dari Barat (Kristen) dan Yahudi, baik dalam aspek agama maupun politik. Contoh yang jelas terlihat adalah krisis kemanusiaan (genosida) di Gaza dan Palestina yang diprakarsai oleh pihak Yahudi, meskipun dunia menyaksikannya dengan pasif. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengambil sikap, namun mereka tidak pernah menyebut kelompok tersebut sebagai teroris, radikal, atau ekstrem. Jika konsep moderasi yang didorong oleh dunia saat ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap agama, lalu mengapa Islam tampak menjadi target yang harus dimoderasi?

Selain kedua faktor tersebut, ada aspek lain yang menarik perhatian penulis mengenai moderasi beragama di Indonesia. Terdapat perubahan dalam cara pandang dan pelaksanaan moderasi di masyarakat. Moderasi yang dulunya menjadi cara untuk menanggapi klaim kebenaran yang sepihak kini bertransformasi menjadi pandangan kebenaran yang relatif, yang berarti menganggap tidak ada kebenaran yang absolut. Bagi mereka yang melihat moderasi dengan cara ini, kebenaran dianggap sebagai milik semua

¹ Iffati Zamimah, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.1, No.1, Juli 2018, h. 75-90

orang, dan setiap kata serta makna bisa ditafsirkan oleh siapa pun, sehingga pada akhirnya menganggap semua agama itu benar dan sebanding. Ini pada akhirnya memaksa untuk menghormati agama lain dengan cara mengakui keyakinan orang lain setara dengan keyakinan sendiri, dan praktik keagamaan harus menyatu dengan budaya setempat. Dalam konteks ini, moderasi tampak terlalu dipaksakan atas nama kerukunan dan toleransi, seperti memberikan ucapan selamat kepada mereka yang merayakan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, serta diizinkan dan dibenarkan untuk ikut serta dalam perayaan tersebut, baik dalam peran memfasilitasi maupun merayakannya.² Penulis berpendapat bahwa sikap ini tidak sesuai. Contoh lainnya yang menjadi perdebatan saat ini adalah salam antargeraja yang dipromosikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, didapati bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa mengucapkan salam yang melibatkan berbagai agama bukan merupakan wujud dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang sejati, sebab pengucapan salam dalam Islam adalah doa yang bersifat 'ubudiyah (ibadah). Padahal Al-Qur'an telah dengan jelas menjelaskan perbedaan antara tauhid dan syirik, yang haq dan yang batil, serta hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan, dan lain-lain. Seharusnya, mereka yang menganggap diri mereka moderat (seimbang) mampu untuk memahami sudut pandang agama lain, bukan menolak dan memberi label intoleran kepada mereka yang menjalankan ajaran agama.

Berangkat dari beragam pemaparan di atas dirasa sangat dibutuhkan perspektif al-Qur'an melalui tinjauan beberapa ayat pilihan mengenai moderasi beragama untuk dijadikan sebagai pisau analisis terhadap implementasi moderasi beragama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i). Tafsir maudhu'i berarti penafsiran Al-Quran menurut tema atau topik tertentu. Pendekatan ini merupakan salah satu model penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Quran.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan mempelajari ayat Al-Quran dengan

² Asep Abdurrohman, *Eksistensi Islam Moderat dalam Prespektif Islam, Jurnal Rausyan Fikr*. Vol.14. No.1, 2018, h. 29-40. DOI: [10.31000/rf.v14i1.671](https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.671)

menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah, dalam hal ini yang terkait dengan moderasi beragama, selanjutnya menyusunnya tanpa merdasarkan pada kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat itu. Selanjutnya diberikan keterangan dan penjelasan serta diambil Kesimpulan yang selanjutnya dijadikan sebagai pisau analisis implementasi moderasi beragam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AYAT AL-QUR'AN TERKAIT MODERASI BERAGAMA

Pertama, Q.S Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, ayat ini menunjukkan larangan untuk memaksa seseorang menganut agama Islam, karena agama seharusnya menjadi dasar kepercayaan yang dipilih secara sukarela dan diyakini tanpa adanya paksaan. Ayat itu juga menekankan pentingnya aturan dan dampak dari kebebasan dalam memilih dan meyakini agama sebagai bagian dari petunjuk ilahi yang datang dari Allah.³ Ini mencerminkan sikap toleransi dalam memberikan hak beragama kepada orang lain, ketika Allah menekankan dengan ucapan *lā ikrāhā fī al-dīn*, yang berarti tidak ada paksaan dalam masuk dan menganut suatu agama, yakni agama Islam.⁴ Kebebasan tanpa paksaan bagi orang lain untuk menganut dan meyakini Islam berlandaskan pada penegasan Allah dalam kalimat *qad tabayyana al-rusydu min al-ghaī*, yang menandakan bahwa kebebasan yang diberikanNya mempunyai akibat logis yang harus diterima. Dengan demikian, ada pernyataan yang jelas antara jalan yang benar dan yang salah sebagai tanda bahwa iman merupakan panduan menuju jalan yang baik, sementara kekufuran diartikan sebagai

³ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), Vol.2, h. 20

⁴ Abd Ḥayy al-Farmawī, *al-Sahī al-Mufīd fī Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2009), h. 114

kesesatan, dan kesesatan itu pada dasarnya merupakan sebuah kebodohan.⁵

Secara teologis, ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, kebebasan beragama tidak berarti membenarkan bahwa keyakinan di luar Islam dianggap benar. Ini lebih pada sikap toleran, di mana seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut Islam, dengan alasan yang jelas bahwa ajaran dan pedoman dari Tuhan telah ditetapkan. Wahbah al-Zuhaylī menekankan bahwa bukti kebenaran sejati berasal dari Allah tanpa keraguan, berdasarkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muḥammad SAW. Menurut Wahbah al-Zuhaylī, mempercayai dan menjalani ajaran Islam akan membawa dampak positif dalam kehidupan yang aman, dan menegaskan bahwa pilihan agama adalah tanggung jawab individu yang akan berdampak pada diri sendiri.⁶

Kedua, Q.S Al-Kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُلَاعَنُوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.

Secara teologis, ayat ini menggambarkan bahwa pemilihan agama seharusnya dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan, karena keyakinan seseorang haruslah berdasarkan pada kehendak Tuhan yang memberikan hak untuk memilih dan beriman. Kebebasan dalam beragama sangat penting dan merupakan bagian dari ajaran agama yang menghargai hak individu untuk menentukan jalannya dalam beriman. Dalam pandangannya, Wahbah Al-Zuhaylī menjelaskan bahwa kebebasan adalah sifat alami yang melekat pada manusia dan diberikan oleh Tuhan, sehingga manusia dilahirkan dalam kondisi bebas. Dalam tafsirnya, kebenaran yang berasal dari Tuhan adalah panduan terbaik bagi kehidupan manusia, sehingga setiap orang bebas untuk memilih kebenaran yang diyakini atau

⁵ Wahbah al-Zuhaylī, Tafsīr al-Munīr..., vol. 2, h. 20

⁶ Ibid, vol. 2, h. 23.

menolaknya.⁷ Ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kebebasan individu adalah aspek penting dari keberadaan manusia yang harus dipertahankan dan dilindungi. Ketiga, Q.S Yūnus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?

Menurut Wahbah Al-Zuhaylī, Tuhan tidak memaksa umat manusia dan tidak merusak pilihan mereka, melainkan memerintahkan mereka untuk beriman serta memberikan mereka kebebasan dan tujuan.⁸ Mengenai keimanan, itu adalah hak sepenuhnya milik Allah terhadap hamba-Nya, jika Dia menghendaki, Dia akan tanamkan keimanan dalam diri seseorang. Pemilihan jiwa untuk beriman tidak bersifat mutlak dan tidak dilakukan sepenuhnya dengan kebebasan, tetapi terikat pada ketentuan-Nya dalam penciptaan. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi petunjuk sesuai dengan hikmah, ilmu, dan keadilan-Nya. Keimanan yang muncul dari paksaan tidak akan memberikan manfaat atau kebaikan bagi individu tersebut. Iman tidak akan mencapai kesempurnaan melalui paksaan, tekanan, atau kekerasan, tetapi iman akan diperkuat melalui kelembutan dan kebebasan.⁹

Q.S. Al-Kafirun ayat 1-6:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ □ .

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” Secara teologis, surah al-kafirun menjelaskan bahwa kebebasan beragama tidak hanya sekadar toleransi terhadap keyakinan tertentu, tetapi juga meliputi hak untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan pribadi. Islam mendorong adanya penghormatan satu sama lain antara pengikut agama yang berbeda tanpa mengganggu

⁷ Wahbah al-Zuhaylī, Tafsīr al-Munīr: fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), Vol.8, h. 264

⁸ Wahbah al-Zuhaylī, Tafsīr al-Munīr: fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), Vol.6, h. 278

⁹ Wahbah al-Zuhaylī, Tafsīr al-Munīr..., Vol.6, h. 291

keyakinan masing-masing.¹⁰

Adapun penyebab turunnya ayat ini berasal dari masa Makkah yang berkaitan dengan perundingan antara tokoh Quraisy Makkah, seperti Umayyah Ibn Khalaf dan al-Walid Ibn al-Mughirah dengan Nabi Muhammad Saw mengenai ajaran agama. Mereka mengajukan tawaran untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw selama satu tahun jika Nabi bersedia mengikuti ajaran mereka selama waktu yang sama. Namun, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran ini dan meminta perlindungan kepada Allah, maka turunlah ayat ini untuk menekankan pentingnya kesetiaan dan keikhlasan dalam menjalani ajaran agama masing-masing.¹¹

Penegasan mengenai kesetiaan dan keikhlasan beragama dapat ditemukan pada ayat 1 hingga ayat 2, yaitu; “*Qul yā ayyuhā al-kāfirūn, lā a’budu mā ta’budūn*” (Katakanlah (Muhammad): wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah). Ini merupakan seruan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan kepada kafir Quraisy bahwa ia tidak akan menyembah segala yang mereka sembah dalam bentuk apapun. Dalam konteks ini, perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw dengan kata *Qul* (katakanlah) berfungsi sebagai perintah untuk bersikap lembut dan menyampaikan setiap persoalan dengan kata-kata yang baik.¹² Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong sikap terbuka, ramah, dan santun dalam menghadapi berbagai masalah. Dalam konteks yang sama, Wahbah Wahbah Al-Zuhayli menekankan bahwa menjalankan ajaran agama berkaitan dengan prinsip keyakinan masing-masing tanpa mempengaruhi, memaksa, atau mencampur adukkan keyakinan kita dengan keyakinan orang lain. Karena inti dari ayat ini adalah panggilan untuk bersikap ikhlas dan patuh dalam mengabdikan kepada Allah sebagai bentuk kesetiaan.¹³

Selanjutnya, “*lakum dīnukum wa lī al-dīn*” (untukmu agamamu, untukku agamaku) menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan keyakinan dan ajarannya sendiri, sedangkan Islam berlandaskan tauhid, keikhlasan, dan kepasrahan. Zamakhsyari menjelaskan bahwa makna dari ayat ini adalah sesungguhnya saya adalah

¹⁰ Isu akidah merupakan hal paling inti dalam setiap agama, sehingga tidak seharusnya kita menggabungkan akidah satu dengan yang lain.. Kementerian Agama, Hubungan Antar Umat Beragam, Tafsir Temati al-Qur’an, h. 40

¹¹ Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Munir: fi al-‘Aqidah wa al-Syar’ah wa al-Manhaj (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), Vol.15 , h. 838

¹² Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Munir...., Vol. 15, h. 842

¹³ Mabruur, Moderasi Al-Qur’an dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern, Muntaz, Vol. 1 No.2 Tahun 2017, h. 39

Nabi yang diutus kepada kalian untuk mengajak pada kebenaran dan keselamatan. Jika kalian menolak ajakanku dan tidak mau mengikutiku, maka tinggalkanlah aku dan jangan ajak aku kepada kesyirikan.¹⁴ Pandangan ini menekankan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap ajaran agama lain, tetapi tidak mengakui kebenarannya, dengan keyakinan bahwa hanya Islam yang dianggap sebagai agama yang benar. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa konsep diluar keyakinan Islam merupakan tindakan syirik yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Oleh karena itu, konsekuensi dari agama adalah tindakan dan balasan, sehingga apa yang diyakini dan dilakukan seseorang akan mempengaruhi dirinya berdasarkan keyakinannya.

Kelima, Q.S. Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mempertanyakan keberadaan agama-agama lain, sehingga sangat penting bagi penganut agama untuk saling menghormati dan menghargai meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Agama dipandang sebagai penghubung sosial karena dapat membangun ikatan emosional dan moral dalam komunitas yang menjaga nilai, kepercayaan, dan tradisi bersama.

Secara moral, ayat ini menunjukkan pentingnya menegakkan etika dan nilai-nilai baik dalam interaksi antar penganut agama, serta menjaga nilai-nilai kebaikan merupakan suatu kewajiban yang harus dipelihara dan dilaksanakan oleh umat Muslim. Larangan untuk mengejek atau mencaci dewa dari agama lain, seperti yang dijelaskan dalam teks ini, bertujuan untuk mencegah terjadinya ketegangan antara umat Islam dan penganut agama lainnya, serta menciptakan suasana damai dan harmonis dalam masyarakat.

Mengenai alasan turunnya ayat ini, Wahbah Al-Zuhaylī menjelaskan, berdasarkan penuturan 'Abd al-Razāq dari Qatādah, bahwa saat itu para sahabat Nabi Saw

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarā'ih wa al-Manhaj (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), Vol.29, h. 842

mencemooh sembahkan orang-orang musyrik berupa bintang, pohon, dan lainnya, yang dapat mengarah pada kemusyrikan. Al-Qur'an kemudian mengingatkan agar tidak melakukan celaan tersebut, karena hal itu dapat menyebabkan orang-orang musyrik membalas dengan menjelek Tuhan umat Islam.

Wahbah Al-Zuhaylī berpendapat bahwa merendahkan dan mencaci Tuhan agama lain tidak sejalan dengan prinsip Al-Qur'an. Meskipun tindakan tersebut mungkin terlihat bermanfaat, dampak negatifnya bisa jauh lebih besar dan sebaiknya dihindari. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas melalui al-Wālibī, disebutkan bahwa orang-orang berkata: "Wahai Muhammad, hentikan celaan kepada dewa-dewa kami, atau kami akan mencela dewa-dewa kamu." Allah Swt melarang hal tersebut karena dapat menimbulkan kebencian dan penghinaan yang lebih dalam terhadap-Nya, yang bisa menyebabkan mereka mencela Allah walaupun mereka tidak memahaminya karena ketidaktahuan mereka.¹⁵

Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kebencian adalah hal yang penting dalam menjalankan ketaatan atau melakukan kebaikan; jika suatu tindakan bisa memicu kerusakan atau permusuhan, maka sebaiknya dihindari. Ini sejalan dengan ajaran untuk bersikap lembut dan penuh kasih sayang, sebagaimana yang diperintahkan kepada Musa dan Harun ketika menghadapi Firaun, "Bicaralah kalian berdua kepadanya dengan lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut" (Q. S. Tāhā: 44).

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM SEJARAH

Penerapan prinsip moderasi dalam Islam tidak hanya muncul dalam beberapa tahun terakhir, tetapi telah diterapkan dari zaman ke zaman. Ada pemahaman dan anggapan yang salah jika dipandang bahwa konsep moderasi dalam Islam merupakan ajaran baru yang berbeda dari Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini adalah kesalahan yang signifikan. Sebagai sebuah agama, ideologi, dan peradaban, Islam telah menyediakan perspektif yang difokuskan pada tatanan masa depan yang bersifat moderat. Bernard Lewis, seorang profesor dari Princeton yang mendalami studi Islam, menyatakan bahwa istilah moderat telah menjadi bagian penting dari masyarakat Muslim sejak awal munculnya Islam. Seorang Muslim sejati memiliki sikap yang bersahabat terhadap lingkungan dan mengakui adanya perbedaan. Nabi pernah bersabda: "perbedaan di antara

¹⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), Vol.7, h. 343

umatku adalah rahmat dari Tuhan,” yang membentuk karakter awal dari komunitas Muslim. Hampir tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan adanya kekerasan dari umat Islam di masa awal, seperti pembakaran tempat ibadah agama lain, pembunuhan masal, dan sebagainya.¹⁶

Nabi Muhammad SAW merupakan contoh sosok yang memiliki karakter seimbang dan adil. Hal ini terlihat dari cara kepemimpinannya dalam mendidik sahabat dan masyarakat dengan dasar iman yang kuat agar dapat menampilkan akhlak terbaik seiring dengan perubahan zaman. Dengan demikian, Nabi SAW adalah tokoh yang berhasil membangun peradaban manusia menjadi masyarakat yang bermoral hingga kini. Selama 23 tahun masa kenabiannya, Nabi Muhammad Saw telah berhasil menanamkan nilai-nilai moderasi kepada para pengikutnya (umat Islam).

Secara historis, umat Islam telah menerapkan prinsip-prinsip kesederhanaan dalam kehidupan beragama. Dalam berbagai kesepakatan dengan orang-orang Quraisy, Nabi lebih memilih nilai-nilai perdamaian dan mencari solusi yang bisa menguntungkan semua pihak. Contohnya, pada Perjanjian Hudaibiyah, Nabi menunjukkan kedewasaan dan ketahanan. Selain itu, Nabi memberikan izin kepada komunitas Kristen Najran untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Tidak hanya itu, saat pertama kali berpindah ke Madinah, beliau telah menandatangani kesepakatan dengan para pemimpin dari berbagai agama, termasuk Yahudi dan Nasrani. Dokumen kesepakatan tersebut dikenal sebagai Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Pengumuman Piagam Madinah oleh Nabi bersama kaum Yahudi dan Nasrani adalah peristiwa penting yang bisa dijadikan acuan. Dalam Piagam Madinah, terdapat penyebutan mengenai keadilan dan kesetaraan warga di Madinah, di mana perjanjian ini merefleksikan prinsip kebebasan dalam beribadah, berdiskusi, dan dalam memeluk agama. Konstitusi ini menegaskan bahwa umat Muslim bersedia hidup harmonis dengan yang non-Muslim. Piagam ini dianggap sebagai contoh nyata dari moderasi yang sesungguhnya.¹⁷

Banyak ulama klasik yang memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, termasuk Syaykh Al-Islām Ibn Taimiyah (1236-1328 M). Dalam karyanya yang berjudul *Al-‘Aqīdah Al-Wāsiṭiyyah*, Ibn Taimiyah menggambarkan teologi tengah sebagai

¹⁶ Bernard Lewis dkk. (2010) *A History of Tolerance* eds, Wall Street Journal <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703369704575461503431290986>, dalam artikel Fatihunnada, *Islam Indonesia Moderat: Perspektif Pandangan Ulama Hadis Indonesia*, The 16th Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) 2016, h. 3-4

¹⁷ Kasmuri Selamat, *Moderasi Islam Perspektif Teologi dan sejarah*, (Jakarta: Klam Mulia, 2019), h. 68

pandangan yang diikuti oleh kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Ia menjelaskan bahwa al-sunnah berarti al-tarīqah, yaitu jalan yang diikuti oleh Nabi Saw, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Sedangkan al-jamā'ah mengacu pada sekelompok orang, yaitu kaum salaf dari kalangan sahabat dan pengikut kebaikan mereka. Menurut Ibn Taimiyah, kelompok ahl al-sunnah memiliki karakter al-nājiyah (selamat) dan al-manşūrah (mendapatkan bantuan). Mengenai pandangan Ibn Taimiyah tentang *Al-'Aqīdah Al-Wasīṭiyyah*, Syafiq Mughni menyatakan bahwa teologi tengah adalah posisi di antara dua ekstrem; yaitu *tamthīl* (menyamakan sifat Tuhan dengan sifat manusia) yang dianut oleh kaum *Musyabbihah* dan *ta'tīl* (menghapuskan sifat-sifat Tuhan) yang diikuti oleh kelompok *Jahmīyah*. Moderasi juga terlihat dalam pandangan mengenai tindakan manusia, misalnya antara Jabarīyah dan Qadarīyah, serta Murji'ah dan Mu'tazilah. Posisi wasaṭiyyah jelas terlihat saat kaum Sunni menilai kedudukan para sahabat yang terlibat dalam perang saudara. *Wasaṭiyyah* telah menjadikan karakter ajaran Islam sebagai agama yang lebih moderat dibandingkan agama lain di dunia. Sangat jelas bahwa konsep wasaṭiyyah yang diajukan oleh Ibn Taimiyah sangat relevan dalam konteks kehidupan beragama yang ditandai oleh polarisasi yang bersifat binaris: inside-outside, ingroup-outgroup, kami-kamu (minna-minkum), dan benar-salah.

Selanjutnya, istilah wasaṭiyyah terkait dengan moderasi dapat ditemukan pada kuartal kedua abad ke-19. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep moderasi dalam beragama tidak muncul tanpa latar belakang, melainkan ada konteks yang mendasarinya. Moderasi diciptakan sebagai solusi alternatif untuk menangani masalah ekstremisme yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada awalnya, pemerintah Indonesia mengambil pendekatan *Empowering the Moderates* untuk memberantas terorisme. Sedangkan Pakistan mengadopsi istilah *Enlightening the Moderates*. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, kedua negara ini menekankan pentingnya jalan moderasi. Namun, karena program ini dianggap mengalami kegagalan, dunia Barat mengusulkan program *Countering Violent Extremism*. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih istilah *Prevention of Violent Extremism*. Sebelumnya, Malaysia juga mendirikan gerakan *Movement of the Moderates*. Dengan mempertimbangkan dinamika yang ada, termasuk insiden radikalisis yang terus berlangsung di beberapa daerah, pemerintah memutuskan untuk menjalankan program deradikalisis. Dalam

berkembangnya, kritik terhadap program deradikalisasi disuarakan dengan keras oleh berbagai kelompok masyarakat sipil, mendorong adanya perubahan dalam pendekatan penanganan radikalisme dari deradikalisasi ke moderasi.¹⁸

Awal mula istilah moderasi yang ditujukan kepada umat Islam bertujuan untuk menyeimbangkan ekstremisme, dengan diperkenalkannya konsep Islam Moderat versi Barat. Setelah runtuhnya Uni Soviet, perhatian dunia mulai tertuju pada Islam dan menganggapnya sebagai suatu ancaman. Pada tahun 1979, insiden revolusi Iran dan bangkitnya radikalisme Islam di Afrika serta Asia Tenggara semakin memperkuat anggapan bahwa Islam mendukung kekerasan. Pandangan Barat terhadap Islam selalu menjadi acuan dalam mengartikan radikalisme dalam konteks kekerasan. Dunia Barat pun membentuk pemahaman tentang Islam melalui citra-citra yang menakutkan, yang pada gilirannya memicu munculnya fenomena Islamophobia.

Di ranah akademik, studi tentang Islam juga banyak berfokus pada isu radikalisme, seperti yang terlihat dari judul-judul karya yang menimbulkan ketakutan seperti; Islam Radikal, Islam Militan, dan Jihad. Penelitian-penelitian tersebut muncul karena ada sekelompok kecil umat Islam yang berpikiran tertutup, yang menunjukkan sisi Islam yang penuh kemarahan, bukan yang bersahabat. Mereka juga memberikan tanggapan negatif terhadap perkembangan moderasi di dunia. Beberapa di antara mereka menyatakan, "Orang yang berpikir untuk mereformasi atau memodernisasi Islam berada di jalan yang salah, dan usaha-usaha mereka pasti gagal. Mengapa perlu dimodernisasi, jika Islam sudah sempurna, murni, bersifat universal, dan berlaku sepanjang masa."¹⁹ Pernyataan ini menunjukkan adanya penolakan terhadap upaya-upaya untuk memoderasi pemahaman tentang ajaran Islam. Akibatnya, pola pikir eksklusif berkembang dan kesulitan dalam merespons moderasi pun terjadi.

Pada waktu yang sama, sejumlah peristiwa kekerasan dan tindakan militansi oleh beberapa anggota umat juga terjadi. Terutama setelah munculnya kasus terorisme yang menarik perhatian global, yaitu serangan terhadap bangunan World Trade Center (WTC) dan Pentagon pada 11 September 2001. Sebuah laporan menyebutkan bahwa serangan terhadap dua lokasi yang telah lama menjadi simbol keamanan negara Amerika Serikat

¹⁸ Biyanto, Moderasi Pemikiran Keagamaan di Indonesia: Sejarah, Konteks, dan Peran Muhammadiyah, https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Makalah-Seminar-MunasTarjih_Biyanto.pdf (diakses 29 Juli 2024)

¹⁹ Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change* (Boulder, Colo: Westview, 1990), h. 73

ini diduga dilakukan oleh Osamah bin Laden, kelompok Al-Qaeda, dan para pelaku bom bunuh diri. Sejak peristiwa tragis tersebut, media Barat gencar memperkenalkan istilah radikalisme, ekstremisme agama, dan terorisme.²⁰ Setelah serangan 11 September, Indonesia juga mengalami berbagai kejadian terorisme, seperti bom Bali I pada 12 Oktober 2002, bom mobil yang merusak hotel J. W. Marriot pada 5 Agustus 2003, bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005, dan bom di kedutaan besar Australia pada 9 September 2004. Kekacauan di dalam dunia Islam tampaknya dibuat-buat. Dimulai dengan invasi Amerika ke Afghanistan (2001) dan Irak (2003), diikuti oleh rangkaian peristiwa Musim Semi Arab (2011) yang mengguncang banyak negara Arab dan kebangkitan ISIS di Timur Tengah (2013). Serangkaian insiden radikal dalam berbagai bentuk terus berlanjut di berbagai tempat hingga hari ini.

Kampanye untuk kebangkitan moderasi mulai terbentuk pada pertengahan abad ke-19, dibuktikan dengan munculnya inisiatif yang dipimpin oleh berbagai reformis. Selanjutnya, para pemikir Muslim mengasimilasi pengetahuan dari Barat untuk memulai reformasi dan kemajuan, sehingga mendorong praktik moderasi yang berkembang melalui adopsi dan adaptasi peradaban Eropa. Azyumardi Azra mengamati bahwa bahasa dan paradigma seputar Islam wasaṭiyyah, yang sering disinonimkan dengan moderasi, mulai berkembang pada awal abad ke-20 dalam konteks pemikiran Islam global. Topik ini telah dieksplorasi dalam banyak tulisan oleh intelektual Arab seperti Muḥammad Rāsyid Riḍā, Muḥammad al-Madanī, Maḥmūd Syaltut, Yūsuf al-Qarḍawī, dan Wahbah al-Zuhaylī.

Dalam konteks Indonesia, Azyumardi Azra menyatakan bahwa karakter moderat dalam Islam adalah sifat alami dari praktik keagamaan umat Muslim di Nusantara yang dapat ditelusuri kembali ke sejarah awal kedatangan Islam di wilayah ini. Walisongo adalah para pelopor yang mahir dalam proses penyebaran Islam awal di Indonesia dengan pendekatan yang damai, tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam, menghormati budaya yang ada, dan bahkan menggabungkannya ke dalam tradisi lokal tanpa mengorbankan identitas aslinya.²¹ Menurut catatan Abdurrahman Mas'ud, Walisongo adalah tokoh-tokoh unik dari Jawa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 yang berhasil

²⁰ John L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam: Answers to Frequently Asked Questions from One of America's Leading Experts* (New York: Oxford University Press, 2011), h. 63

²¹ Miftahuddin, *Islam Moderat konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis*, Jurnal Mozaik, Vol.5. No. 1, 2010, h. 42-43

mengintegrasikan elemen spiritual dan sekuler dalam menyebarkan agama Islam.²² Pada masa Walisongo, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui penggabungan ajaran Islam dengan budaya lokal secara harmonis. Metode ini membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak mengganggu kepercayaan yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, Islam dapat tumbuh dan beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus memperkaya kebudayaan lokal tanpa kehilangan inti ajarannya.

Kehadiran keragaman budaya yang timbul dari penyebaran Islam ke berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang berbeda tidak bisa dihindari, meskipun seluruh penganutnya berasal dari agama yang sama. Kekuatan budaya setempat akan memengaruhi sejauh mana ajaran agama yang bersifat universal bisa beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Hal ini terlihat dari perbedaan dukungan antara gerakan Islam "modernis" seperti Muhammadiyah yang lebih diterima di wilayah perkotaan, dan "tradisional" seperti Nahdlatul Ulama yang lebih terkenal di area pedesaan.

Pada dasarnya, Nahdlatul Ulama mendasarkan pendekatan moderasi mereka pada keyakinan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah sebagai fondasi utama. Mereka menerima empat mazhab dalam aspek akidah, yaitu mazhab Ḥanafī, Malīkī, Syafī'ī, dan Ḥambalī, serta merujuk pada pemikiran para cendekiawan terkenal seperti Imam Abu Hasan al-Asy'arī dan Imam Abu Manṣur al-Maturidī. Dalam hal Fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti metode dari mazhab Abu Ḥanīfah, Mālīkī, Syāfi'i, dan Ḥambalī, sedangkan dalam tasawuf, mereka meneladani gagasan sejumlah imam terkemuka seperti Al-Junayd Al-Baghdadī dan Al-Ghazālī.

Dalam konteks keagamaan, Nahdlatul Ulama mengintegrasikan prinsip wahyu (*naqlīyyah*) dengan kemampuan berpikir manusia (*'aqlīyyah*) agar dapat beradaptasi dengan dinamika sosial. Mereka menunjukkan sikap menerima terhadap tradisi budaya dan sosial di masyarakat, yang berbeda dengan kelompok di luar ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Nahdlatul Ulama percaya bahwa tradisi budaya dan masyarakat harus diadaptasi ke dalam Islam secara bertahap dengan pendekatan yang lebih religius. Pendekatan moderat yang diusung oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia menekankan pentingnya kebijaksanaan, keseimbangan, dan toleransi dalam menyebarluaskan nilai-

²² Adurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Cet.I, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 54-58

nilai Islam. Mereka menghargai budaya setempat dan berupaya untuk mengintegrasikan tradisi masyarakat ke dalam nilai-nilai agama, menjadikan para ulama sebagai agen yang membawa perubahan sosial sekaligus melindungi dan merawat tradisi lokal dengan rasa penghargaan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi yang merugikan, tetapi untuk mempromosikan moderasi dalam Islam.²³

Merefleksikan sejarah penjajahan di Indonesia, Muhammadiyah telah mengimplementasikan konsep moderasi dengan menekankan pada pendidikan dan perubahan budaya. Organisasi Muhammadiyah tersebut lebih memilih berdialog daripada menggunakan kekerasan untuk melawan penjajah, mencerminkan komitmen mereka terhadap moderasi Islam dalam konteks sejarah itu. Pendekatan pendidikan dan perubahan budaya menjadi fokus utama Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan penjajahan pada masa tersebut.²⁴

Moderasi dalam Muhammadiyah adalah ide yang diciptakan oleh pendirinya, K. H. Ahmad Dahlan, yang menekankan pentingnya toleransi dan harmoni dalam interaksi dengan semua lapisan masyarakat, termasuk dalam konteks keagamaan dan sosial. Meskipun demikian, nilai-nilai agama masih dijunjung tinggi tanpa mengabaikan sikap toleransi dalam hal beragama dan berinteraksi dengan masyarakat, seperti yang terlihat dalam hubungan baik K. H. Ahmad Dahlan dengan teman-teman dari berbagai latar belakang agama. Beliau tidak meninggalkan prinsip-prinsip keagamaan yang dianutnya, tetapi tetap menjunjung tinggi keyakinan tersebut sembari mempertahankan sikap toleransi baik dalam beragama maupun dalam bersosialisasi.²⁵

Pendekatan moderasi dalam beragama diterima sebagai metode efektif untuk mencapai peradaban global. Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam bidang agama di zaman modern ini, moderasi beragama bisa menjadi pilihan untuk melawan radikalisme atau ekstremisme. Muhammad Hāsīm Kamālī menyatakan bahwa konsep *wasatīyyah* dalam Al-Qur'an mencerminkan semangat moderasi dalam beragama, yang mencakup pemikiran, sikap, dan tindakan. Diskusi mengenai moderasi beragama semakin menguat, di mana penerapan moderasi dalam Islam kini telah memasuki fase

²³ Miftahuddin, Islam Moderat konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis, Jurnal Mozaik, Vol.5. No. 1, 2010, h. 21-25

²⁴ Ibid, h. 51-52

²⁵ Asep Abdurrohman, Eksistensi Islam Moderat dalam Prespektif Islam, Jurnal Rausyan Fikr. Vol.14. No.1, 2018, h. 34

kebangkitan. Umat Islam kini belajar dari kemajuan yang dicapai oleh negara-negara Eropa di berbagai bidang. Selain itu, para pemuda Islam juga diarahkan untuk pergi ke barat guna mempelajari ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan yang bisa diadopsi untuk peradaban Islam di masa depan.

18 Oktober dirayakan di Indonesia sebagai "Hari Moderasi Beragama," yang menandai peluncuran buku "Moderasi Beragama" oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019, saat Lukman Hakim Saefuddin menjabat sebagai Menteri Agama. Tahun 2019 ditetapkan sebagai Tahun Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama, sesuai dengan pengumuman Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Tahun Moderasi Internasional. Buku tentang moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menekankan peran negara dalam menginternalisasi nilai-nilai agama sambil mengapresiasi keragaman agama serta pandangan yang berbeda mengenai kebenaran beragama. Proses internalisasi ini bertujuan menjadikan agama sebagai dasar spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan masyarakat, komunitas, bangsa, dan negara. Di sisi lain, sikap menghargai perbedaan pandangan dan praktik beragama bertujuan untuk mendorong kehidupan beragama yang moderat guna memperkuat komitmen kebangsaan.

PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN IMPLEMETASI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Ada berbagai pandangan masyarakat yang salah dalam memahami konsep moderasi dalam beragama. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa bersikap moderat berarti tidak memiliki pendirian yang jelas, dianggap tidak total dalam beragama, serta dipersepsikan sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai fundamental keagamaan. Namun, pandangan tersebut jelas tidak benar. Bersikap moderat dalam beragama tidak sama sekali berarti mengorbankan prinsip-prinsip inti atau ritual penting agama hanya untuk menyenangkan orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Selain itu, moderasi dalam beragama juga bukanlah alasan bagi individu untuk tidak mengamalkan ajaran dari keyakinannya dengan serius. Sebaliknya, bersikap moderat dalam beragama berarti memiliki keyakinan yang kuat terhadap inti ajaran agama yang dianut, yang mendorong nilai keadilan dan keseimbangan, serta berbagi kebenaran yang relevan dengan interpretasi agama.

Setidaknya ada tiga masalah utama yang menjadi tantangan dalam mendefinisikan konsep moderasi di masyarakat Indonesia, yaitu:

Masalah pertama yang muncul dalam gagasan moderasi beragama adalah sifat bias terhadap pluralisme agama. Moderasi Beragama dipandang sebagian kalangan sebagai Perspektif Baru dalam Pluralisme Agama. Moderasi beragama yang pada akhirnya mengarah pada dukungan terhadap ide pluralisme agama, yang menyatakan bahwa setiap agama adalah setara dan pluralisme merupakan tujuan dari masing-masing agama.²⁶ Ini menunjukkan bahwa dalam usaha untuk membangun kerukunan antar penganut agama, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana konsep moderasi beragama dapat memengaruhi sudut pandang terhadap pluralisme agama serta pemahaman mengenai perbedaan kepercayaan.

Dalam perkembangannya, pemahaman pluralisme agama dapat dikelompokkan berdasarkan cara berpikir para penganutnya menjadi empat kategori, yaitu; skeptis, positivis, dan naturalis, relativisme, esensialisme, serta sinkretisme. Setiap kelompok ini memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai kebenaran agama, mulai dari skeptisisme bahwa tidak ada agama yang benar hingga keyakinan bahwa semua agama memiliki kebenaran yang setara, serta argumen bahwa semua agama pada dasarnya memiliki kesamaan meskipun terdapat perbedaan dalam cara penyampaiannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap tradisi agama besar memiliki nilai untuk keselamatan dan tidak bersifat final.²⁷

Gagasan tentang moderasi beragama memiliki benang merah yang serupa dengan ide pluralisme agama, di mana topik tentang toleransi, penyesuaian budaya setempat, dan penolakan terhadap ekstremisme lebih mencerminkan konsep pluralisme itu sendiri. Penting untuk memberikan perhatian khusus pada konsep moderasi beragama yang diajukan oleh Kementerian Agama, karena jika konsep tersebut mengarah pada pluralisme agama, maka harus ditolak karena tidak sejalan dengan UUD 1945 dan dapat menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam dan Kristen.

Masalah kedua dalam konsep moderasi beragama adalah bias makna toleransi beragama. Dalam kerangka moderasi beragama di Indonesia, bias dalam pengertian toleransi beragama merujuk pada sikap yang menerima keberagaman agama dengan cara mengakui dan menghormati keyakinan orang lain. Ini tidak hanya berlaku dalam lingkup

²⁶ Khalid Rahman Aditia Muhammad Noor, *Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*, (Malang: UB Press, 2020)

²⁷ Henri Shalahuddin, dkk., *Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia*, Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.9, No.2, Juni 2023, h.708

sosial dan masyarakat, tetapi juga dalam aspek teologis, yang menekankan pada pengakuan bahwa setiap keyakinan itu sebanding dengan keyakinan pribadi di hadapan Tuhan. Toleransi dalam konteks moderasi beragama adalah sikap yang menerima perbedaan agama dengan percaya bahwa semua agama mengajarkan nilai-nilai baik bagi pengikutnya. Meskipun berbeda dalam tampilan luar, hakikatnya tetap sama. Pandangan ini merupakan hasil pemikiran liberalisme Barat yang menempatkan kebenaran agama dalam perspektif relatif sebagai wujud toleransi dan menekankan bahwa kebenaran agama bersifat tidak mutlak.

Masalah ketiga dalam moderasi beragama adalah kebenaran yang bersifat relatif dalam moderasi beragama.

Dalam kajian moderasi beragama, ada isu mengenai kebenaran agama yang dianggap tidak absolut, khususnya dalam interpretasi ajaran agama. Para aktivis keagamaan mengkritisi ide pluralisme dalam moderasi beragama, mempersepsikannya sebagai ancaman dan risiko yang signifikan. Pluralisme merupakan konsep yang diajarkan semua agama untuk membangun keharmonisan dan perdamaian. Dalam hal ini, konsep kebenaran dipahami sebagai seberapa besar manfaat yang diberikan untuk peradaban manusia, bukan lagi sebagai sesuatu yang absolut dan objektif. Oleh karena itu, terdapat persamaan antara pemikiran moderasi beragama dan pluralisme agama, di mana berbagai ajaran agama dipandang sebagai cara yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran.²⁸

Dalam kerangka pengarusutamaan moderasi beragama, konsep moderasi beragama menghadapi sejumlah rintangan dari beberapa pihak atau kelompok di Indonesia. Rintangan tersebut mencakup penolakan terhadap ide ini dan perlawanan yang timbul akibat stereotip sosial dari kelompok-kelompok tertentu, yang menjadi masalah tersendiri dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia karena dampaknya terhadap penerimaan masyarakat umum dan komunitas keagamaan di negara ini. Jika dibahas lebih mendalam, isu-isu yang terkait dengan penguatan moderasi beragama di Indonesia masih berhadapan secara tajam dengan faktor-faktor berikut;

Rintangan pertama yang dihadapi adalah terdapat sebagian kelompok yang melihat penerapan moderasi beragama melalui lensa teori hegemoni. Strategi dari Barat berusaha memecah belah komunitas dengan menjadikan moderasi beragama sebagai agenda yang terungkap dalam dokumen Rand Corporation.

²⁸ Ibid, h. 709.

Saat ini, umat Islam terbagi menjadi empat kategori, yaitu fundamentalis, tradisional, modernis, dan sekuleris. Tentu saja, kelompok modernis dan sekuleris menjadi pendorong utama agenda Barat. Sementara itu, tradisional adalah individu yang berusaha agar tidak dipandang sebagai radikal atau teroris, dan mereka juga turut berkontribusi dalam menghadapi kelompok fundamentalis. Pengelompokan ini terjadi karena kelompok fundamentalis memiliki dua ciri: 1) Mereka menolak nilai-nilai Barat dan bentuk penjajahan; 2) Mereka ingin menerapkan Islam secara keseluruhan. Keinginan ini mendorong umat Muslim untuk terus mengkritik setiap kebijakan yang berdampak merugikan dan merusak masyarakat. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi Barat yang berupaya menjaga hegemoni mereka.²⁹

Gerakan yang menentang wacana ini, dengan memanfaatkan teori hegemoni, akan menciptakan prasangka sosial yang luas di tengah masyarakat, dan menjadi masalah yang signifikan bagi penerapan moderasi beragama di Indonesia. Gerakan yang menentang wacana secara luas menyebarkan propaganda yang dapat mempengaruhi aspek kognitif, emosi, dan perilaku dalam masyarakat agar menolak pandangan bahwa moderasi beragama adalah bagian dari hegemoni atau konspirasi gerakan global Barat dengan para pemimpin Indonesia dalam rangka melemahkan kekuatan ajaran agama, khususnya Islam.

Rintangan kedua dalam pengarusutamaan moderasi beragama adalah propaganda isu yang menggunakan teori benturan peradaban. Salah satu isu yang diangkat oleh kelompok-kelompok yang menolak moderasi beragama adalah anggapan bahwa moderasi beragama dianggap sebagai dukungan pemerintah terhadap *Global War on Terrorism* (GWOt), sebuah kampanye dari Barat setelah serangan WTC pada 11 September 2001.

Dalam pandangan beberapa kelompok, kampanye tersebut menyasar Islam moderat, yang mereka anggap sebagai Islam yang tidak berseberangan dengan Barat dan tidak menolak sekularisme. Oleh karena itu, inti dari Islam moderat dipersepsikan sebagai Islam sekuler yang menerima nilai-nilai Barat seperti demokrasi dan hak asasi manusia, serta bersedia berkompromi dengan imperialisme Barat³⁰ (Puspita, Tintasiyasi. com, 2021). Barat mendefinisikan "Islam moderat" sebagai lawan dari "Islam radikal." Sementara itu,

²⁹ Dudy Imanuddin Efefendi, *Prasangka Sosial: Problematika Moderasi Beragama*, Monografi, 18 April 2022, h. 33-35, <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/50367> (diakses 25 Juli 2024)

³⁰ Puspita, Hakikat Islam Moderat, <https://www.tintasiyasi.com/2021/07/>, 2021

radikal diartikan sebagai sikap yang tidak mau berkompromi dengan nilai-nilai Barat, sehingga Islam moderat dianggap sebagai yang bersedia mengikuti petunjuk dari Barat. Ini adalah versi Islam menurut perspektif Barat.

Dalam pandangan kelompok yang menolak moderasi beragama, sesungguhnya Islam moderat dijadikan alat oleh Barat untuk menghancurkan. Ini menjauhkan umat dari potensi kebangkitannya serta dari jati dirinya sebagai umat terbaik, yang merupakan pemimpin. Bahkan, hal ini juga mengaburkan makna ummatan wasātan yang sejati, yaitu umat yang kokoh pada kebenaran, tidak mau berkompromi dengan kebatilan, dan nantinya akan menjadi saksi bagi umat lain tentang kebenaran itu.³¹

Teori benturan peradaban digunakan untuk menggambarkan bagaimana ideologi Islam dianggap berada dalam ancaman akibat pengaruh intelektual Barat, termasuk gagasan moderasi beragama. Serangan intelektual ini dilihat sebagai usaha non-fisik dari Barat yang ditujukan pada dunia Islam, melalui cara-cara seperti pencucian otak dan westernisasi untuk merubah cara berpikir serta perilaku umat Muslim. Stigma sosial dalam konteks teori benturan peradaban menunjukkan penolakan terhadap dampak moderasi Barat yang dianggap merusak nilai-nilai agama dan identitas Islam.

Rintangan ketiga dalam pengarusutamaan moderasi beragama adalah ketika kelompok-kelompok yang menolak moderasi beragama menggunakan Teori Oligarki.

Dalam narasi yang disampaikan tentang moderasi beragama, terdapat pandangan dan prasangka yang dibangun melalui argumen oligarki. Isu radikalisme dipandang sebagai masalah yang rumit dengan implikasi ganda. Pertama, elit global memanfaatkan isu radikalisme untuk menekan dan menciptakan citra negatif terhadap kelompok yang berbeda dengan kepentingan mereka. Kedua, oligarki setempat memanfaatkan isu ini untuk menyingkirkan kelompok yang tidak sejalan dengan agenda politik dan kekuasaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa isu radikalisme dapat digunakan oleh berbagai pihak demi kepentingan politik dan kekuasaan.

Di balik isu radikalisme juga terdapat konsep moderasi beragama. Motif yang melatarbelakangi narasi moderasi beragama termasuk upaya untuk mencegah kemunculan Islam politik yang dianggap berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Barat dalam pengaturan urusan umat dan ekonomi. Selain itu, ada usaha untuk menciptakan kesan bahwa Amerika Serikat tidak menentang Islam dengan membedakan antara Islam

³¹ Dudy Imanuddin Efefendi, *Prasangka Sosial ...*,h. 36-39

moderat dan radikal.³² Isu ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam memperluas pendidikan moderasi beragama. Kelompok-kelompok yang memiliki pandangan negatif cenderung meningkatkan propaganda mereka melalui berbagai platform media sosial dan diskusi, bahkan dapat berkembang menjadi gerakan sosial globalisasi yang menolak dominasi hegemoni dengan fokus pada kontrol politik yang demokratis dan pembangunan manusia yang setara.

Isu berikutnya berhubungan dengan bagaimana menempatkan konsep moderasi beragama dalam konteks tradisi agama yang besar, bukan hanya tradisi yang lebih kecil. Para aktivis yang menolak moderasi beragama sering kali mengganti sebutan tersebut menjadi moderasi agama atau bahkan moderasi Islam, yang dapat memengaruhi pemahaman asli tentang makna moderasi beragama. Perubahan pada istilah ini dapat berdampak pada pandangan, pengertian, dan pergeseran arti yang sebenarnya dari konsep tersebut, termasuk dalam hal perluasan, penyempitan, dan perubahan makna istilah. Moderasi beragama sering diartikan secara keliru sebagai moderasi agama, padahal nilai-nilai moderasi, keadilan, dan keseimbangan sebenarnya sudah diajarkan dalam agama itu sendiri. Tim Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa yang seharusnya dimoderasi bukanlah agama secara keseluruhan, melainkan cara individu dalam mempraktikkan ajaran agama agar tidak menjadi ekstrem. Ini sangat penting untuk menyadari perbedaan antara agama sebagai ajaran yang jelas dan praktik beragama yang dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi masing-masing individu.³³

Isu berikutnya sangat terkait dengan pelaksanaan moderasi beragama. Klaim kebenaran yang saling bertentangan sering muncul dari manusia yang memiliki batasan dalam memahami agama, padahal sejatinya hakikat kebenaran hanya ada pada Tuhan Yang Maha Benar. Daya hancur dari konflik yang muncul karena perbedaan penafsiran agama sangat tinggi, mengingat agama menyentuh aspek terdalam dari jiwa manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, moderasi beragama menjadi isu penting dalam merespons apa yang dianggap oleh sebagian orang sebagai meningkatnya radikalisme atau ekstremisme dalam beragama. Istilah moderasi beragama lebih merupakan kritik terhadap istilah deradikalisasi yang dalam pelaksanaannya cenderung menghadapi para radikal atau ekstremis.

³² Dudy Imanuddin Efefendi, *Prasangka Sosial ...*, h. 42-44

³³ Kementerian Agama RI, *Buku Saku: Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Cet.1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.15

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kelompok yang sering menyebut diri mereka sebagai moderat (*tawāsut*), yang berusaha untuk menengahi sikap-sikap radikal atau ekstrem dalam beragama, terkadang justru menghadapi kelompok yang ingin mereka moderasikan. Jika yang dimaksud sebagai moderasi beragama dalam praktiknya justru berlawanan dengan kaum radikal atau ekstremis, maka sebenarnya tidak tepat untuk menyebutnya sebagai moderasi beragama. Berdasarkan sejumlah penelitian, radikalisme atau ekstremisme yang terjadi di Indonesia tidak secara langsung disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang ekstrem, namun lebih banyak dipicu oleh ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi serta politik yang ditunjukkan secara mencolok oleh beberapa elit politik dan sebagian kecil orang yang sering disebut sebagai golongan oligarki, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Kekacauan dan polarisasi dalam keberagamaan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan tidak mencerminkan adanya usaha untuk menjalankan moderasi beragama. Sebaliknya, yang terjadi adalah pertikaian antara satu kelompok ekstrem atau radikal dengan kelompok ekstrem atau radikal lainnya.

Secara prinsip, upaya moderasi beragama seharusnya tidak saling berhadapan dengan usaha yang dilakukan oleh kelompok radikal, baik yang berada di sisi ekstrem kiri maupun kanan. Namun kenyataannya justru sebaliknya, di mana moderasi beragama seharusnya berusaha menjadi penengah, menjalin persahabatan, melindungi, dan memberikan kesadaran melalui cara-cara yang bijaksana serta ucapan yang baik. Jika upaya moderasi beragama justru memicu ketegangan dan konflik, maka sulit untuk menyebutnya sebagai moderasi beragama. Meskipun ada yang memaksakan untuk menyebutnya demikian, itu tidak lebih dari sekadar moderasi beragama yang kosong makna.³⁴

Isu berikutnya dari moderasi beragama di era digital terkait dengan penggunaan media sosial dan propaganda oleh kelompok ekstremis dan radikal yang dapat merusak moderasi beragama dengan menyebarkan informasi palsu, retorika kebencian, dan berita yang bias. Ini dapat mempengaruhi persepsi publik dan menghambat upaya untuk mempromosikan dialog antaragama. Masalah konten berbahaya di platform media sosial juga kompleks dan sulit untuk dimoderasi secara online.

³⁴ Ma'mun Murod Al-Barbasy, *Moderasi Beragama Tanpa makna*, <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/> (diakses 25 Juli 2024)

Dampak penggunaan media sosial dan propaganda oleh kelompok ekstremis dan radikal terhadap moderasi beragama mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan moderasi beragama di dunia digital saat ini. Di antara poin-poin utama adalah;

Pertama, bahwa penyebaran pesan dapat merugikan moderasi beragama. Kelompok ekstremis dan radikal menggunakan media sosial dan propaganda untuk menyebarkan pesan yang bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama.

Kedua, pesan-pesan berbahaya ini dapat mempengaruhi persepsi publik. Masyarakat yang terus-menerus terpapar konten ekstrem dapat mengembangkan pandangan yang lebih radikal yang menghambat upaya untuk mempromosikan dialog antaragama dan toleransi.

Ketiga, kompleksitas dalam memoderasi konten online. Ini juga menekankan kompleksitas dalam memoderasi konten berbahaya di platform media sosial. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penyedia platform dan regulator dalam mengidentifikasi dan menghapus konten ekstrem dan berbahaya.³⁵

Tidak bisa disangkal bahwa ada polarisasi di kalangan umat Islam yang menjadi tantangan tersendiri di dalam masyarakat. Umat Islam terbagi menjadi dua kelompok yang memiliki pandangan tentang agama yang berbeda. Satu kelompok cenderung sangat kaku dalam pemahaman agama dan berusaha memaksakan interpretasinya kepada masyarakat Muslim, yang terkadang berujung pada tindakan kekerasan (ekstrem kanan/fanatik). Sementara kelompok lainnya bersikap lebih santai dalam beragama dan mengikuti perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain (ekstrem kiri/sekuler). Untuk menangani fenomena keagamaan seperti yang telah disebutkan, Kementerian Agama Republik Indonesia berusaha mendorong umat agar mengedepankan moderasi dalam beragama, menghormati beragam tafsir, serta menghindari sikap ekstrem, intoleran, dan tindak kekerasan.

Wacana tentang moderasi beragama semakin menguat dan dianggap sebagai solusi untuk menangani isu radikalisme yang terkait dengan agama sebagai jalan tengah. Islam mengandalkan prinsip *wasatiyyah* dalam menghadapi masalah keagamaan. Untuk memahami karakter moderasi dalam beragama, umat Islam dapat merujuk kepada hasil

³⁵ Asep Saepul Rochman, *Problematika dan Solusi dalam moderasi Beragama*, Jurnal Rayah Al-Islam, Vo.7, N0.3, Desember 2023, h. 1385-1386

Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2015, yang menghasilkan dua belas prinsip yang menggambarkan karakter moderasi tersebut. Prinsip-prinsip moderasi yang disebutkan antara lain; tengah (*tawāsut*), seimbang (*tawāzun*), adil (*i'tidal*), toleran (*tasāmuh*), kesetaraan (*musawā*), musyawarah (*syurā*), pembaruan (*išlah*), berpikiran prioritas (*awlawiyyah*), dinamis dan inovatif (*taṭawwur wa ibtikar*), berkeadaban (*tahaḍḍur*), mencintai tanah air (*waṭaniyyah wa muwaṭanah*), dan menjadi pelopor (*quḍwatiyyah*).

Pertemuan antara para ulama dan cendekiawan Muslim dari seluruh dunia di Bogor, yang dihadiri oleh Syaykh Al-Azhar Ahmad Muḥammad Aḥmad al-Ṭayyib, menghasilkan sebuah dokumen berjudul “Pesan Bogor” yang menguraikan konsep wasatiyyah dengan tujuh karakteristik utama, yaitu; 1) *Tawāzun* (memosisikan diri di tengah dan sejajar), 2) *I'tidal* (bertindak secara proporsional dan adil dengan mempertimbangkan tanggung jawab), 3) *Tasāmuh* (menerima dan menghargai perbedaan dalam setiap aspek hidup), 4) *Syurā* (menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan), 5) *Išlah* (berpartisipasi dalam langkah-langkah reformasi dan konstruktif demi kebaikan bersama), 6) *Quḍwah* (menjadi teladan yang baik dan memimpin untuk kesejahteraan masyarakat), serta 7) *Muwaṭanah* (menerima keberadaan negara bangsa dan menghormati status kewarganegaraan).³⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa pokok Kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an telah meletakkan dasar penting dalam moderasi beragama, yang terlihat jelas dalam banyaknya ayata baik yang langsung maupun tidak langsung yang bercerita mengenai moderasi beragam. Karakteristik ajaran Islam yang wasatiyyah juga semakin menguatkan bahwa moderasi beragama merupakan bagian integral dari ajaran Islam.
2. Moderasi beragama telah terimplementasikan sepanjang sejarah peradaban Islam. Walaupun dalam implementasinya terjadi pasang surut, namun mayoritas umat Islam sepanjang zaman tetap berpegang pada moderasi beragama, mulai dari zaman Nabi,

³⁶ Biyanto, *Moderasi Pemikiran Keagamaan di Indonesia: Sejarah, Konteks, dan Peran Muhammadiyah*, https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Makalah-Seminar-MunasTarjih_Biyanto.pdf (diakses 29 Juli 2024)

khulafaur rasyidin, dan masa – masa kekhalifahan Islam, bahkan hingga di zaman modern.

3. Ada banyak tantangan dan rintangan dalam implementasi moderasi beragama di Indonesia, mulai dari sisi yang terkait pendefinisian moderasi beragama itu sendiri, selanjutnya bagaimana tantangan menjadikan sikap moderat sebagai arus utama sikap mayoritas umat Islam, hingga tantangan dalam menempatkan konsep moderasi beragama dalam konteks tradisi agama yang besar. Terlepas dari beragam tantangan di atas, MUI telah menetapkan prinsip dalam moderasi beragama, sebagaimana prinsip ini juga dikuatkan oleh Kemenag dengan menetapkan pilar moderasi beragama.

REFERENSI

- Abd Ḥayy al-Farmawī. (2009). *al-Sahl al-Mufīd fī Tafsīr al-Qur’ān al-Majīd*. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Abdurrahman Mas’ud. (2006). *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Cet.I, Jakarta: Kencana.
- Asep Saepul Rochman. (2023). *Problematika dan Solusi dalam moderasi Beragama*, Jurnal Rayah Al-Islam, Vo.7, N0.3.
- Asep Abdurrohman. (2018). *Eksistensi Islam Moderat dalam Prespektif Islam*, Jurnal *Rausyan Fikr*. Vol.14. No.1. DOI: [10.31000/rf.v14i1.671](https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.671)
- Bassam Tibi. (1990). *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change*. Boulder, Colo: Westview.
- Bernard Lewis dkk. (2010) *A History of Tolerance* eds, Wall Street Journal <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703369704575461503431290986>, dalam artikel Fatihunnada, Islam Indonesia Moderat: Perspektif Pandangan Ulama Hadis Indonesia, The 16th Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) 2016.
- Biyanto. (2020). *Moderasi Pemikiran Keagamaan di Indonesia: Sejarah, Konteks, dan Peran Muhammadiyah*, https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Makalah-Seminar-MunasTarjih_Biyanto.pdf (diakses 29 Juli 2024)
- Dudy Imanuddin Efefendi. (2022). *Prasangka Sosial: Problematika Moderasi Beragama*, Monografi, , <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/50367> (diakses 25 Juli 2024)
- Henri Shalahuddin, dkk. (2023). *Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia*, Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.9, No.2.
- Iffati Zamimah. (2028). *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, *Al-Fanar*:

Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol.1, No.1.

- John L. Esposito. (2011). *What Everyone Needs to Know About Islam: Answers to Frequently Asked Questions from One of America's Leading Experts*. New York: Oxford University Press.
- Kasmuri Selamat. (2019). *Moderasi Islam Perspektif Teologi dan Sejarah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Buku Saku: Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Cet.1 Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khalid Rahman Aditia Muhammad Noor. (2020). *Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*. Malang: UB Press.
- Ma'mun Murod Al-Barbasy. (tt). *Moderasi Beragama Tanpa makna*, <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/> (diakses 25 Juli 2024)
- Mabrur. (2017). *Moderasi Al-Qur'an dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern*, Mumtaz, Vol. 1 No.2
- Miftahuddin. (2010). *Islam Moderat konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis*, Jurnal Mozaik, Vol.5. No. 1.
- Wahbah al-Zuhaylī. (2009). *Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* Damaskus: Dār al-Fikr, Vol.2